

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses pencatatan dan perhitungan yang berisi ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan selama periode tertentu. Manajemen memberikan tugas pencatatan laporan keuangan ini kepada seorang akuntan. Agar dapat menggambarkan secara jelas maksud laporan yang akan disampaikan, laporan keuangan disusun berdasarkan standar atau kaidah sesuai ilmu akuntansi keuangan yang diterapkan. Pemakai laporan keuangan yang berkepentingan diantaranya: pemegang saham, manajemen, kreditur, calon investor dan kreditur, organisasi buruh, dan inspeksi pajak. Laporan keuangan tidak hanya digunakan pihak internal dari perusahaan saja namun juga pihak eksternal perusahaan.

Mengingat pentingnya kehadiran laporan keuangan yang transparan di suatu perusahaan, maka dilakukanlah audit. Audit merupakan sebuah proses untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti kejadian ekonomi mengenai kebijakan serta aktivitas ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara pernyataan dengan kriteria yang telah ditetapkan dan menyampaikan hasilnya kepada pihak yang berkepentingan untuk diproses lebih lanjut. Standar audit yang sesuai dengan kriteria adalah yang mencakup mutu profesional (*professional qualities*) auditor independen dan pertimbangan (*judgement*) yang digunakan dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan audit.

Laporan keuangan yang baik pada dasarnya telah melewati proses audit yang baik juga. Untuk menyajikan laporan keuangan yang benar, perusahaan wajib melakukan audit atas laporannya baik melalui auditor internal perusahaan maupun auditor eksternal perusahaan. Para pemakai laporan keuangan akan sangat menginginkan kualitas audit dari auditornya agar tidak terjadi hal yang diinginkan seperti halnya kecurangan (*fraud*) dan salah saji material (*material misstatements*) dalam proses audit laporan keuangan perusahaannya. Akuntan publik yang dipercayakan untuk mengaudit laporan keuangan suatu perusahaan akan sangat menjaga nama baik auditornya, meminimalisasi risiko litigasi dan menjaga kepuasan pihak perusahaan (klien).

Menurut Agoes (2012:4), *auditing* adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Auditor dituntut untuk menjaga kode etik dalam melakukan proses audit. Kurangnya independensi serta kompleksitas dan *time budget pressure* yang selalu menekan auditor, menyebabkan rentannya perilaku menyimpang seperti manipulasi data akuntansi yang membuat hilangnya kepercayaan para pengguna laporan keuangan tersebut. Kejadian penyimpangan ini tidak jarang ditemukan di dunia akuntansi Indonesia. Hal semacam ini hanya membuat penurunan reputasi bagi auditor dan juga Kantor Akuntan Publik (KAP) tempat kerja auditornya.

Kasus yang menyangkut kerusakan moral dalam dunia akuntansi yang terjadi di Indonesia adalah kasus PT Katarina Utama Tbk dengan KAP Budiman, Wawan, Pamudji & Rekan. Bermula pada tanggal 10 Juni 2009, perusahaan yang didirikan 20 Juni 1997 itu memperoleh surat pernyataan efektif dari BAPEPAM-LK untuk melakukan penawaran umum perdana (IPO) atas 210 juta saham atau setara 25,95% dari modal disetor kepada publik dengan nilai nominal Rp 100 per saham dan harga penawaran Rp 160 per saham. Dari hasil penawaran umum tersebut PT Katarina Utama Tbk mendapatkan dana Rp 33,6 miliar.

Pada 14 Juli 2009, seluruh saham tersebut sudah dicatat di BEI. Biaya emisi IPO dianggarkan sebesar 7,85% atau sebesar Rp 2,637 miliar. Itu berarti dana IPO yang diperoleh perseroan setelah dikurangi biaya IPO sebesar Rp 30,962 miliar. Sebelum melakukan IPO, PT Katarina Utama diduga telah mempercantik laporan keuangan tahun 2008. Dalam dokumen laporan keuangan 2008 nilai asset perseroan terlihat naik hampir 10 kali lipat dari Rp 7,9 miliar pada 2007 menjadi Rp 76 miliar pada 2008. Adapun ekuitas perseroan tercatat naik 16 kali lipat menjadi Rp 64,3 dari Rp 4,49 miliar.

Seperti tahun 2008, laporan keuangan tahun 2009 juga diduga penuh angka-angka yang fiktif. Dalam laporan keuangan audit 2009, Katarina mencantumkan ada piutang usaha dari MIG sebesar Rp 8,606 miliar dan pendapatan dari MIG sebesar Rp 6,773 miliar, selain itu PT Katarina Utama Tbk melakukan penggelembungan aset dengan memasukan sejumlah proyek fiktif senilai Rp 29,6 miliar. Rinciannya adalah piutang proyek dari PT Bahtiar

Mastura Omar Rp 10,1 miliar, PT Ejey Indonesia Rp 10 miliar dan PT Inti Bahana Mandiri Rp 9,5 miliar. Setahun pasca *listing* dugaan penyelewengan dana IPO mulai tercium otoritas bursa dan pasar modal atas laporan pemegang saham dan Forum Komunikasi Pekerja Katarina (FKPK). PT Katarina Utama Tbk diduga melakukan penyalahgunaan dana hasil IPO sebesar Rp 28,971 miliar dari total yang diperoleh sebesar Rp 33,60 miliar. Realisasi dana IPO diperkirakan hanya sebesar Rp 4,629 miliar. Menurut rencana prospectus, dari dana hasil penawaran umum perseroan menjanjikan sekitar 54,05% akan dipakai untuk kebutuhan modal kerja sementara 36,04% sisanya akan diperuntukan untuk membeli berbagai peralatan proyek.

Dugaan penyelewengan tersebut dipicu oleh laporan keuangan perseroan yang menunjukkan angka-angka yang tidak normal. Pada 2010, jumlah aset terlihat menyusut drastis dari Rp 105,1 miliar pada 2009, menjadi Rp 26,8 miliar. Ekuitas anjlok dari Rp 97,96 miliar menjadi Rp 20,43 miliar. Adapun pendapatan yang tadinya sebesar Rp 29,9 miliar, hanya tercatat Rp 3,7 miliar. Perseroan pun menderita kerugian sebesar Rp 77 miliar dari periode sebelumnya yang memperoleh laba Rp 55 miliar.

Pada 1 September 2010 saham PT Katarina Utama Tbk (RINA) disuspensi oleh Bursa Efek Indonesia. Audit yang dilakukan oleh KAP Akhyadi Wadisono memberikan opini *disclaimer* selama tahun 2010 dan 2011. Tanggal 1 Oktober 2012 otoritas bursa memberikan sanksi administratif dan melakukan *delisting* atas saham PT Katarina Utama Tbk, yang berkode RINA.

Akibat kasus ini perusahaan tidak dapat memenuhi hak-hak karyawannya. Bahkan selama ini manajemen tidak menyampaikan secara utuh dana jamsostek yang dipotong dari gaji karyawan, ada juga karyawan yang tidak mengikuti jamsostek tetapi gajinya juga ikut dipotong. Perusahaan Listrik Negara telah memutuskan aliran listrik ke kantor cabang PT Katarina Utama di Medan karena tidak mampu membayar tunggakan listrik sebesar 9 juta untuk tagihan 3 bulan berjalan.

Penyalahgunaan dana penawaran umum ini disebabkan karena adanya kelemahan dalam pengendalian internal PT Katarina Utama. Akibat lemahnya pengendalian internal tersebut pihak manajemen hanya merealisasikan sebagian kecil dana hasil penawaran umum, sedangkan selebihnya diduga diselewengkan oleh pihak manajemen. Selain itu manipulasi laporan keuangan juga disebabkan oleh pihak internal yang dengan sengaja melakukan manipulasi guna mempercantik angka-angka dalam laporan keuangan agar menarik investor yang akan membeli saham PT Katarina Utama.

Meskipun belum ada pernyataan dari otoritas bursa mengenai keterlibatan pihak yang mengaudit laporan keuangan 2008, namun kuat dugaan adanya keterlibatan pihak auditor. Hal ini karena hasil audit yang dikeluarkan KAP Budiman, Wawan, Pamudji dan Rekan justru menyatakan opini wajar padahal ada dugaan laporan keuangan tersebut telah dimanipulasi. Dugaan keterlibatan pihak auditor semakin kuat setelah KAP Akhyadi Wadisono melakukan audit atas laporan keuangan 2010 dan memberikan opini *disclaimer* karena tidak dapat melakukan konfirmasi atas transaksi yang ada.

Adanya kasus ini menjukan bahwa otoritas bursa masih mempunyai kelemahan dalam pengawasannya. Otoritas bursa, dalam hal ini BEI dan Bapepam-LK baru menyadari adanya keganjilan pada PT Katarina Utama Tbk setelah pada Agustus 2010 pemegang saham dan Forum komunikasi Pekerja Katarina (FKPK) melaporkan adanya penyimpangan dana hasil penawaran umum.

Dampak dari kasus ini adalah pemberian sanksi administratif oleh otoritas bursa dan delisting dari bursa efek Indonesia, setelah selama 2 tahun sebelumnya saham PT Katarina Utama Tbk yang berkode RINA disuspensi dan tidak diperdagangkan. Kasus ini juga memberikan dampak bagi operasional perusahaan karena tidak adanya modal kerja, selain itu karyawan tidak diberikan hak-hak karyawan secara penuh akibat penghentian kegiatan operasional. Bahkan selama ini manajemen tidak menyampaikan secara utuh dana jamsostek yang dipotong dari gaji karyawan, ada juga karyawan yang tidak mengikuti jamsostek tetapi gajinya juga ikut dipotong.

Adapun dalam kasus PT Katarina Utama Tbk ini, ada 5 pelanggaran terhadap prinsip tata kelola yang baik.

1. *Transparansi (Transparency)*

PT Katarina Utama tidak menyampaikan informasi dengan benar, seperti yang telah disampaikan bahwa Manajemen RINA telah memanipulasi laporan keuangan dengan memasukkan sejumlah piutang fiktif guna memperbesar nilai aset perseroan dan memperbesar nilai pendapatan sehingga informasi yang diterima oleh para pemangku

kepentingan menjadi tidak akurat yang mengakibatkan para pemangku kepentingan seperti investor menjadi salah mengambil keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa PT Katarina Utama telah melanggar prinsip Transparansi (Keterbukaan) dalam penyampaian informasi.

## 2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Telah terbukti bahwa Katarina Utama tidak merealisasikan dana hasil IPO sesuai dengan prospektus perseroan dan melakukan penyelewengan dana, sehingga terjadi ketidak efektifan kinerja perseroan. Laporan Keuangan yang dihasilkannya pun menjadi tidak akurat dan tidak dapat dipercaya. Hal ini jelas menjadi bukti bahwa PT Katarina Utama gagal dalam menerapkan prinsip akuntabilitas.

## 3. Responsibilitas (*Responsibility*)

PT Katarina Utama melanggar prinsip Responsibilitas dengan melakukan penyelewengan dana milik investor publik hasil IPO sebesar Rp 29,04 miliar, manajemen PT Katarina Utama juga tidak menyelesaikan kewajibannya kepada karyawan dengan membayar gaji mereka, selain itu PT Katarina Utama tidak membayar tunggakan listrik sebesar Rp 9 juta untuk tagihan selama 3 bulan berjalan. Berdasarkan informasi yang diperoleh sebagian besar direksi dan pemangku kepentingan perseroan dikabarkan telah melarikan diri ke luar negeri. Hal ini jelas menggambarkan bahwa RINA melanggar Prinsip Responsibilitas.

#### 4. Independensi (*Independency*)

Adanya manipulasi laporan keuangan menunjukkan bahwa divisi keuangan yang membuat laporan tersebut tidak independen. Meskipun merupakan bagian internal dari PT Katarina Utama, pihak yang bertanggungjawab membuat laporan keuangan haruslah membuat laporan keuangan sesuai nilai yang sebenarnya tanpa manipulasi tanpa terpengaruh pihak manajemen meskipun pihak manajemen menginginkan adanya manipulasi.

#### 5. Keadilan (*Fairness*)

PT Katarina Utama tidak memperlakukan secara adil para pemangku kepentingan, investor tidak diperlakukan secara adil dan tidak ada keadilan pula bagi karyawan. Hal itu sangat jelas tergambar pada pemotongan gaji untuk asuransi jamsostek para karyawan, telah dipaparkan diatas bahwa para karyawan yang tidak mengikuti asuransi jamsostek gajinya tetap ikut dipotong tanpa alasan yang jelas. Selain itu cabang RINA di Medan telah melakukan penutupan secara sepihak tanpa menyelesaikan hak hak para karyawan dengan tidak membayar gaji sesuai dengan pengorbanan yang telah mereka berikan kepada PT Katarina Utama, terbukti bahwa manajemen PT Katarina Utama melanggar prinsip Keadilan.

Dari *Report on the Observance of Standards and Codes (ROSC)* tahun 2010 yang membahas tentang Akuntansi dan *Auditing* pada kualitas akuntan publik di Indonesia dilaporkan bahwa Kementerian Keuangan menemukan

dari KAP yang ada (lebih dari 400 KAP), hanya sebagian kecil yang dapat memenuhi standar audit dengan baik dan benar. Tidak adanya kepatuhan terhadap standar (*compliance gap*) yang disebutkan berikut ini.

1. Banyak auditor yang tidak mengikuti prosedur audit dengan benar
2. Auditor tidak menelaah lebih lanjut *fraud* (kecurangan) dalam laporan keuangan
3. Para auditor tidak mempersiapkan dengan baik dokumen-dokumen penting yang seharusnya diikutsertakan
4. Banyak auditor yang mengikuti saja pendapat rekan auditornya

Setelah melihat banyaknya kasus yang terjadi, penulis mencari dan menelaah penelitian-penelitian terdahulu yang membahas tentang hubungan antara independensi dengan kualitas audit. Seperti pada penelitian M. Nizarul Alim, Trisni Hapsari, dan Liliek Purwanti (2007) yang menunjukkan bahwa independensi berpengaruh terhadap kualitas audit. Tetapi, pada penelitian oleh Muh. Taufiq (2010) menunjukkan hasil yang sebaliknya, independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Penelitian terdahulu terkait dengan hubungan antara *time budget pressure* dengan kualitas audit menunjukkan hasil yang beragam. Agneus Shintya, Muhammad Nuryatno, dan Ayu Aulia Oktaviani (2016) mengatakan bahwa *time budget pressure* berpengaruh terhadap kualitas audit. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Andini Eka Setyorini (2011), beliau menyatakan bahwa *time budget pressure* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Beberapa penelitian sebelumnya juga menunjukkan hasil yang berbeda antara hubungan kompleksitas dengan kualitas audit. Penelitian oleh Abdul Muhshyi (2013) mengatakan bahwa kompleksitas audit berpengaruh terhadap kualitas audit. Sedangkan hasil penelitian yang berbeda diteliti oleh Rr. Putri Arsika Nirmala (2013), yang menyatakan bahwa kompleksitas tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Dengan banyaknya kasus yang saling terkait dengan kualitas audit serta beberapa penelitian terdahulu yang menimbulkan perbedaan hasil, maka penulis tertarik dan ingin meneliti tentang *“Pengaruh Independensi, Time Budget Pressure dan Kompleksitas terhadap Kualitas Audit (Studi Kasus pada Auditor di Kantor Akuntan Publik di Jakarta)”*.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, penulis mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Banyaknya auditor yang merasakan tekanan pada waktu auditnya sehingga dapat mempengaruhi hasil auditnya
2. Auditor dituntut memiliki independensi yang baik
3. Terdapat kompleksitas tugas audit yang membuat auditor tidak melakukan audit dengan prosedur yang benar dan menyeluruh
4. Semakin dibutuhkannya informasi keuangan yang transparan, namun tidak sejalan dengan peningkatan kualitas audit oleh auditornya

5. Beberapa hasil penelitian yang telah meneliti kualitas audit muncul dengan hasil beragam, hal tersebut membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang kualitas audit.

### **C. Pembatasan Masalah**

Dari beberapa masalah yang dikemukakan di atas, membuat penelitian ini terbatas pada masalah “Pengaruh Independensi, *Time Budget Pressure* dan Kompleksitas terhadap Kualitas Audit (Studi Kasus pada Auditor di Kantor Akuntan Publik di Jakarta)”. Pembatasan masalah ini muncul untuk penghematan biaya, mudahnya akses dan keterbatasan waktu yang dihadapi penulis.

### **D. Perumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah dikemukakan, penulis membuat rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah *time budget pressure* berpengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah kompleksitas berpengaruh terhadap kualitas audit?

### **E. Kegunaan Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah berikut ini:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Dengan penelitian ini, penulis ingin menemukan bukti empiris tentang pengaruh independensi, *time budget pressure* dan kompleksitas terhadap kualitas audit
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan, wawasan serta pengalaman dalam pengembangan kemampuan ilmiah khususnya pada penelitian tentang “Pengaruh Independensi, *Time Budget Pressure* dan Kompleksitas Terhadap Kualitas Audit”.
2. Kegunaan Praktis
- a. Memberikan tambahan wacana penelitian empiris bagi akademisi dan pertimbangan untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya
  - b. Diharapkan dapat menjadi pedoman untuk evaluasi para auditor yang bekerja untuk KAP, menjadi lebih baik lagi dalam hasil kualitas audit yang prima dan dipercayai masyarakat.